

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi di Indonesia dan Malaysia**

###### **1. Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi di Indonesia**

Prostitusi yang pada umumnya dapat diartikan sebagai suatu tindakan pembiaran diri berbuat zina, pergendakan dan juga pencabulan yang dilakukan dengan tujuan komersialisasi seks. Dalam setiap kegiatan prostitusi terdapat pihak-pihak yang terlibat didalamnya seperti PSK, mucikari dan pengguna jasa. Prostitusi juga merupakan suatu perbuatan penyimpangan sosial karena hal tersebut sangatlah bertentangan dengan moralitas dan norma. Dan juga prostitusi mencerminkan perbuatan yang mengarah pada tindakan amoral sebab hal tersebut mendegradasi harkat dan martabat manusia. Dapat dikatakan bahwa prostitusi merupakan sebuah kejahatan dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Tindak pidana prostitusi merupakan suatu tindak pidana yang termasuk dalam kejahatan terhadap kesusilaan yang tertuang dalam KUHP di Indonesia. Tindak pidana prostitusi ini mengarah kepada adanya suatu perbuatan melakukan hubungan seks diluar nikah dengan tujuan memperoleh imbalan atas perbuatan yang telah dilakukan. Tindak pidana prostitusi yang mengarah pada adanya hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan. Dalam KUHP pengaturan mengenai prostitusi diatur

dalam pasal 284, 296 dan 506 KUHP. Dalam pasal 284 ayat (1) dan (2) KUHP menjelaskan bahwa:

(1) Dihukum penjara maksimal selama 9 bulan:

1. a. Laki-laki yang telah beristri, yang melakukan perbuatan berzina.  
b. Perempuan yang telah bersuami, yang melakukan perbuatan berzina
2. a. Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedangkan diketahuinya bahwa yang turut bersalah, sudah bersuami  
b. Perempuan yang tidak bersuami, yang turut melakukan perbuatan itu, sedangkan diketahuinya, bahwa yang turut bersalah sudah beristri dan Pasal 27 BW berlaku baginya.

(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga

Dalam pasal 296 KUHP menjelaskan bahwa:

Barang siapa yang memiliki mata pencaharian atau kebiasaannya yakni dengan sengaja mengadakan atau memudahkan terjadinya perbuatan cabul dengan orang lain diancam pidana penjara maksimal 1 tahun 4 bulan.

Sedangkan dalam pasal 506 menjelaskan bahwa :

Barang siapa yang bertindak sebagai mucikari untuk mengambil keuntungan dari kegiatan pelacuran perempuan diancam dengan pidana kurungan maksimal 1 tahun.

Berdasarkan ketiga pasal diatas penulis akan menjabarkan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut dalam uraian tabel dibawah ini.

**Tabel 1. Unsur-unsur dalam Pasal 284, 296 dan 506 KUHP**

No.	Pasal	Unsur Subyektif	Unsur Obyektif	Keterangan
1.	284 ayat (1) dan (2) KUHP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laki-laki beristri artinya setiap orang laki-laki yang dalam ikatan perkawinan</li> <li>• Perempuan bersuami artinya perempuan yang dalam ikatan perkawinan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berzina artinya melakukan hubungan seksual diluar ikatan perkawinan yang sah</li> </ul>	Dalam pasal ini hanya berlaku bagi setiap orang yang melakukan perzinahan diluar perkawinan yang sah. Sedangkan dalam pasal 284 ayat (2) berlaku delik absolut.
2.	296 KUHP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Barang siapa yang artinya terhadap setiap orang.</li> <li>• dengan sengaja yang artinya dengan penuh kesadaran sengaja melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mata pencahariannya atau kebiasaannya</li> <li>• Mengadakan atau mempermudah perbuatan cabul.</li> </ul>	Dalam pasal ini dimaksudkan terhadap setiap orang yang mengadakan tempat prostitusi. Atau bisa juga ditujukan kepada seorang mucikari.
3.	506 KUHP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Barang siapa yang artinya terhadap setiap orang.</li> <li>• Sebagai mucikari yang artinya bertindak sebagai mucikari.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan.</li> </ul>	Dalam pasal ini dimaksudkan terhadap setiap orang yang bertindak sebagai mucikari yang mendapatkan imbalan atas tindakannya mempermudah terjadinya pelacuran terhadap perempuan.

Sumber Data : Diolah dari analisa Pasal 284, 296 dan 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Aturan yang terdapat dalam KUHP dapat dilihat bahwa prostitusi yang mengarah pada terjadinya perbuatan zina, berdasarkan pasal 284 tidak dapat dijadikan sebuah acuan dalam melakukan penindakan atas tindak pidana prostitusi sebab pasal 284 hanya menjelaskan konsep perzinahan yang dilakukan atas orang-orang yang sudah berada dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Dan juga dalam pasal 284 ayat (2) tidak dapat digunakan untuk menjerat seorang PSK secara langsung sebab pasal ini merupakan delik absolut yang artinya tidak dapat dituntut apabila tidak terdapat pengaduan dari pihak suami maupun istri (yang merasa dirugikan). Pasal 284 hanya berlaku apabila salah satu dari subyek prostitusi itu sudah berada dalam ikatan perkawinan yang sah, sedangkan subyek prostitusi yang belum berada dalam ikatan perkawinan yang sah tidak dapat dijerat menggunakan pasal ini.

Dalam konteks tindak pidana prostitusi menurut KUHP yang dapat dipidana hanyalah orang yang menjadi mucikari atau orang yang mengadakan tempat pelacuran saja. Sedangkan terhadap PSK dan pengguna jasa tidak dapat dijatuhi pidana berdasarkan pasal ini. Sedangkan dalam prostitusi yang menjadi subyek utama terjadinya prostitusi adalah PSK dan pengguna jasa. Sebab kedua orang ini yang lebih berperan terhadap terjadinya perbuatan zina. Sedangkan mucikari hanya bertindak membantu mempermudah terjadinya perbuatan zina.

Selain dalam KUHP, ada beberapa aturan yang mengatur mengenai prostitusi seperti UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik dan UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam UU ITE pengaturan mengenai prostitusi terdapat pada pasal 27 ayat (1) yang menjelaskan bahwa:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pendistribusian atau mentransmisikan atau memudahkan dapat diakses informasi atau dokumen elektronik yang memiliki konten yang melanggar kesusilaan.

Berdasarkan pasal diatas penulis akan menjabarkan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut dalam uraian tabel dibawah ini.

**Tabel 2. Unsur-unsur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

No.	Pasal	Unsur Subyektif	Unsur Obyektif	Keterangan
1.	27 Ayat (1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setiap orang yang artinya setiap manusia sebagai subyek hukum.</li> <li>• Dengan sengaja yang artinya dengan penuh kesadaran sengaja melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang.</li> <li>• Tanpa hak artinya tidak berhak melakukan tindakan tersebut.</li> </ul>	Pendistribusian atau pentransmisian atau memudahkan dapat diakses informasi atau dokumen elektronik yang memiliki konten yang melanggar kesusilaan	Dalam pasal ini dimaksudkan terhadap setiap orang yang melakukan kegiatan prostitusi melalui dunia maya atau yang sering dikenal sebagai prostitusi online.

Sumber Data : diolah dari analisa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang ITE hanya mengatur mengenai motif sebelum terjadinya kegiatan prostitusi, semisal seorang mucikari atau PSK

melakukan tindakan mentransmisikan foto atau video melalui media elektronik yang bermuatan kesusilaan dengan tujuan menawarkan diri kepada pengguna jasa. Sedangkan terhadap terjadinya hubungan seks antara para pelaku tindak pidana prostitusi tidak dapat dijerat dengan menggunakan undang-undang ini. Dengan demikian UU ITE tidak tepat jika digunakan dalam memberantas tindak pidana prostitusi.

Selanjutnya dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, aturan mengenai prostitusi terdapat dalam pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan bahwa :

Setiap orang yang melakukan tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan atau menerima seseorang yang disertai dengan adanya ancaman kekerasan, penculikan, penyalahgunaan wewenang kekuasaan, pengekangan, penipuan, pemalsuan, penjeratan utang atau memberi bayaran yang dilakukan dengan tujuan eksploitasi manusia di teritorial republik indonesia akan dipidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda minimal Rp. 120.000.000 dan maksimal Rp. 600.000.000.

Berdasarkan pasal diatas penulis akan menjabarkan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut dalam uraian tabel dibawah ini.

**Tabel 3. Unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

No.	Pasal	Unsur Subyektif	Unsur Obyektif	Keterangan
1.	2 Ayat (1)	Setiap orang yang artinya setiap manusia sebagai subyek hukum.	Melakukan tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan atau menerima seseorang yang disertai dengan adanya ancaman kekerasan, penculikan, penyalahgunaan wewenang kekuasaan, pengekangan, penipuan, pemalsuan, penjeratan utang atau memberi bayaran yang dilakukan dengan tujuan eksploitasi manusia di teritorial republik indonesia	Dalam pasal ini dimaksudkan terhadap setiap orang yang bertindak sebagai mucikari yang berhubungan dengan perdagangan atau eksploitasi manusia.

Sumber Data: diolah dari analisa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 2 ayat (1) UUTPPO ini merupakan perluasan dari pasal 297 KUHP yang memuat segala unsur perdagangan orang yang dilakukan oleh mucikari. Sebab peran mucikari dalam prostitusi dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan memperdagangkan atau mengeksploitasi manusia. Namun dalam pasal ini, orang yang menjadi PSK cenderung dikategorikan sebagai korban dari perdagangan manusia. Sedangkan pada tindak pidana prostitusi PSK dan pengguna jasa merupakan subyek prostitusi. Jika pasal ini diterapkan dalam tindak pidana prostitusi maka akan terjadi ambiguitas antara PSK sebagai korban dan PSK sebagai pelaku. Jadi UUTPPO kurang tepat rasanya jika digunakan untuk memberantas prostitusi.

Dapat dilihat dari beberapa aturan yang telah dijelaskan diatas, bahwa Indonesia masih belum memiliki aturan yang khusus dalam menangani tindak pidana prostitusi. Aturan yang ada hanya melakukan pemidaan terhadap mucikari saja sedangkan PSK dan pengguna jasa tidak dapat dipidana. Hal tersebut mencerminkan bahwa negara Indonesia belum memberikan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Padahal prostitusi itu sendiri sangatlah bertentangan dengan segala tata nilai dan norma yang berlaku di masyarakat Indonesia.

## **2. Prostitusi Berdasarkan Pendekatan Pancasila**

Pancasila sebagai *groundnorm* yang dijadikan sebagai sumber dari segala tata nilai dan norma merupakan pedomam utama dalam melakukan pembentukan hukum bagi masyarakat di Indonesia. Pancasila merupakan cita hukum masyarakat Indonesia yang dirinci dalam UUD 1945 pasal-pasalnya yang pada hakekatnya mengandung norma-norma hukum yang dibentuk berdasarkan norma fundamental yakni pancasila, kemudian dituangkan dalam ketentuan-ketentuan batang tubuh UUD 1945.<sup>40</sup> Dalam hal ini dapat dipastikan bahwa Pancasila digunakan dalam menemukan dan menggali hukum. Dalam kaitannya dengan tindak pidana prostitusi yang sampai saat ini masih belum memilki aturan yang khusus untuk menangani permasalahan tersebut, harusnya Pancasila

---

<sup>40</sup> Menurut Hamid S. Atamimi dalam I Gede Dewa Atmadja. 2012. *Hukum Konstitusi Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*. Malang: Setara Press. Hal. 52



dapat digunakan untuk melihat sejauh mana tindak pidana prostitusi dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Dapat dilihat dalam Pancasila sila kedua yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya bahwa dalam menjalankan setiap aktifitas kehidupan bersosial harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia maka diperlukan suatu penghargaan dan perlakuan yang sama terhadap setiap warga negara.

Tindak pidana prostitusi yang mengarah pada adanya perilaku seks bebas dan komersialisasi seks tentu tidak mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila khususnya sila kedua. Sebab prostitusi mencerminkan adanya degradasi moral terhadap setiap warga negara. Hal ini dapat dilihat bahwa dengan adanya prostitusi manusia akan cenderung melakukan kepuasan seksual melalui eksploitasi seks dengan cara komersialisasi seks tanpa melalui kemuliaan atau kehormatan yakni melalui ikatan perkawinan yang sah. Manusia yang terlibat dalam prostitusi hanya menjadi komoditas jasa seksual yang dapat diperjual belikan.

### **3. Prostitusi Berdasarkan Pendekatan Agama**

Nilai-nilai Pancasila dalam kaitannya dengan agama terdapat dalam sila pertama yang mengatakan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa hukum harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan Tuhan yang tercermin melalui setiap ajaran-ajaran agama. Hukum agama khususnya hukum islam termasuk dalam hukum positif di Indonesia. Karena masyarakat Indonesia yang mayoritas merupakan pemeluk agama islam. Dalam tindak pidana prostitusi,

hukum islam tidak mengakui segala bentuk perzinaan termasuk dengan adanya prostitusi. Sebab dengan adanya prostitusi akan merusak moral dan membiarkan kekejian meruntuhkan keutuhan masyarakat. Dengan adanya prostitusi menyebabkan hilangnya iman dalam diri manusia.

Selanjutnya dalam agama nasrani menganggap bahwa adanya prostitusi merupakan suatu hal yang tidak patut, karena dapat merusak keutuhan rumah tangga. Dalam agama hindu menganggap prostitusi sebagai suatu hal yang dilarang, karena dalam ajaran agama hindu tubuh wanita merupakan susu kehidupan bagi generasi selanjutnya. Jika prostitusi tetap dilakukan maka dianggap sebagai perbuatan memperjual belikan susu kehidupan maka akibatnya akan menjadi kutukan bagi kehidupan manusia.

#### **4. Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi Di Malaysia**

Negara Malaysia merupakan negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon* yang lebih merujuk pada hukum kebiasaan dan yurisprudensi menjadi sendi utama dalam sistem hukumnya. Berbeda dengan Indonesia yang menganut sistem hukum *Civil Law* yang lebih merujuk kepada peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama dalam sistem hukumnya. Akan tetapi dalam perumusan peraturan, baik Malaysia maupun Indonesia tetap tidak mengesampingkan hukum yang berlaku di masyarakat seperti hukum adat dan hukum islam. Meskipun demikian pemisahan antar kedua system hukum tersebut tidak begitu ekstrim karena efek dari adanya globalisasi yang begitu pesat menyebabkan hukum terus bergerak.

Dalam segi sosial masyarakat Malaysia yang mayoritas merupakan pemeluk agama islam. Dalam hal ini antara Indonesia dan Malaysia memiliki sebuah persamaan, yaitu merupakan negara mayoritas islam. Dapat kita lihat pada negara Malaysia yang memiliki hukum positif berdasarkan hukum islam. Bahkan dalam pengaturan mengenai tindak pidana prostitusi, negara Malaysia menggunakan hukum islam yang dimuat dalam *Syariah Criminal Offences (Federal Territories) Act 1997* yang merupakan suatu undang-undang yang mengatur segala bentuk pelanggaran pidana syariah di negara Malaysia. Namun peraturan tersebut hanya terbatas pada wilayah teritorial Kuala Lumpur dan Labuan. Dan peraturan tersebut hanya berlaku bagi pemeluk agama islam saja.

Berdasarkan *Syariah Criminal Offences (Federal Territories) Act 1997*, tindak pidana prostitusi dikategorikan sebagai suatu pelanggaran pidana syariah yang termuat dalam Pasal 21, 22, dan 23 ayat (1). Dalam pasal tersebut mengatur setiap pihak yang terlibat dalam tindak pidana prostitusi, baik para pelaku atau subyek prostitusi seperti PSK dan pengguna jasa maupun mucikarnya itu sendiri.

Prostitusi diatur dalam Pasal 21 *Syariah Criminal Offences (Federal Territories) Act 1997* yang menyebutkan bahwa :

- (1) Setiap wanita yang melacurkan dirinya sendiri akan dinyatakan bersalah karena melakukan pelanggaran dan akan dihukum denda yang tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjara selama jangka waktu tidak lebih dari tiga tahun atau hukuman cambuk yang tidak melebihi enam pukulan atau kombinasi apa pun daripadanya.
- (2) Siapa saja yang—

- a) melacurkan istri atau anak perempuan di bawah asuhannya; atau
- b) menyebabkan atau mengizinkan istri atau anak perempuan di bawah pelacur careto sendiri,

Akan dinyatakan bersalah karena melakukan pelanggaran dan akan dihukum dapat dikenakan denda tidak melebihi lima ribu ringgit atau hukuman penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari tiga tahun atau hukuman cambuk tidak melebihi enam pukulan atau kombinasi apa pun daripadanya.

Pasal 22 *Syariah Criminal Offences (Federal Territories) Act 1997*

mengatur mengenai mucikari yang terlibat dalam praktik prostitusi. Pasal ini menyebutkan bahwa:

22. Setiap orang yang bertindak sebagai muncikari akan dinyatakan bersalah karena melakukan pelanggaran dan akan dihukum denda yang tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjara dengan jangka waktu tidak melebihi tiga tahun atau hukuman cambuk yang tidak melebihi enam pukulan atau kombinasi apa pun daripadanya.

Selanjutnya dalam pasal 23 ayat (1) lebih mengatur terhadap pihak yang terlibat dalam hubungan seks diluar pernikahan yang sah. Hal ini sejalan dengan unsur-unsur prostitusi yang lebih cenderung melakukan hubungan seks diluar pernikahan yang sah. Pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa:

23. (1) Setiap pria yang melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang bukan istrinya yang sah akan bersalah atas pelanggaran dan dakwaan wajib akan dikenakan denda tidak melebihi lima ribu ringgit atau hukuman penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari tiga tahun atau dicambuk tidak melebihi enam pukulan atau kombinasi apa pun darinya.

(2) Setiap wanita yang melakukan hubungan seksual dengan seorang pria yang bukan suaminya yang sah akan bersalah atas pelanggaran dan harus dihukum karena denda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjara untuk jangka waktu tidak melebihi tiga tahun atau cambuk tidak melebihi enam tahun stroke atau kombinasi apa pun darinya.

Dari ketiga pasal tersebut diatas penulis akan menjabarkan unsur-unsur yang terkandung dalam setiap pasal dalam tabel dibawah ini

**Tabel 4. Unsur-unsur dalam Pasal 21, 22 dan 23 ayat (1) *Syariah Criminal Offences (Federal Territories) Act 1997***

No.	Pasal	Unsur Subyektif	Unsur Obyektif	Keterangan
1.	21 ayat (1)	Setiap wanita dinyatakan bersalah karena melakukan pelanggaran yang berarti setiap wanita yang dengan penuh kesadaran telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.	Melacurkan dirinya sendiri yang berarti adanya suatu perbuatan perbiaran diri sendiri untuk menjadi pelacur.	Dalam pasal ini berlaku bagi setiap wanita yang berprofesi sebagai pelacur atau pekerja seks komersial.
2.	21 ayat (2)	Siapa saja yang berarti setiap orang sebagai subyek hukum.	Melacurkan istri atau anak perempuan di bawah asuhannya atau menyebabkan atau mengizinkan istri atau anak perempuan di bawah pelacur careto sendiri yang berarti adanya persetujuan dari suami atau ayah yang bertindak sebagai pihak ketiga dalam praktik prostitusi.	Pada pasal ini dapat kita lihat bahwa seseorang yang bertindak sebagai pekerja seks komersial maupun pihak ketiga yang terlibat dalam prostitusi akan dikenakan sanksi pidana atas tindakan pelanggaran terhadap undang-undang yang telah dilakukan.
3.	22	Siapapun akan dinyatakan bersalah karena melakukan pelanggaran yang berarti bahwa setiap orang dengan kesadaran penuh telah melakukan pelanggaran	Bertindak sebagai muncikari yang berarti tindakannya sebagai muncikari yang terlibat dalam praktik prostitusi.	Dalam pasal ini dimaksudkan terhadap setiap orang bertindak sebagai muncikari dalam tindak pidana prostitusi.

4.	23 ayat (1)	Setiap pria akan bersalah atas pelanggaran dan dakwaan yang berarti bahwa setiap pria dengan penuh kesadaran telah melakukan pelanggaran	Melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang bukan istrinya yang sah yang berarti tindakan melakukan suatu hubungan seksual diluar pernikahan yang sah dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum.	Pasal ini berkaitan dengan perbuatan zina yang dilakukan baik oleh pria maupun wanita yang melakukan hubungan seksual diluar ikatan perkawinan yang sah. Dan dalam pasal ini dapat digunakan untuk menjerat para pengguna jasa prostitusi yang kebanyakan adalah laki-laki.
5.	23 ayat (2)	Setiap wanita akan bersalah atas pelanggaran dan dakwaan yang berarti bahwa setiap wanita dengan penuh kesadaran telah melakukan pelanggaran	Melakukan hubungan seksual dengan seorang pria yang bukan suaminya yang sah yang berarti tindakan melakukan suatu hubungan seksual diluar pernikahan yang sah dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum.	

Sumber Data : diolah dari analisa Undang-undang Pidana Syariah Malaysia atau *Syariah Criminal Offences (Federal Territories) Act 1997*

Selanjutnya dalam kanun jinayah syariah di wilayah negeri Kelantan. Dalam peraturan ini tidak terdapat pasal yang mengatur tindak pidana prostitusi secara khusus, hanya mengatur mengenai perzinaan. Namun pada dasarnya tindak pidana prostitusi tergolong dalam perbuatan zina. Pada kanun jinayah syariah, perbuatan zina terdapat dalam pasal 12 yang melarang setiap orang baik

laki-laki maupun perempuan melakukan hubungan seksual diluar ikatan perkawinan yang sah.<sup>41</sup>

Berdasarkan aturan yang telah dibuat oleh negara Malaysia, dapat dilihat bahwa negara Malaysia lebih serius dalam menangani tindak pidana prostitusi. Pemidanaan terhadap setiap orang yang terlibat dalam prostitusi baik PSK, pengguna jasa maupun mucikari telah mencerminkan bahwa negara Malaysia telah melakukan upaya represif terhadap tindak pidana prostitusi.

Dalam segi penafsiran konsep perzinaan, negara Malaysia telah membentuk suatu aturan yang terstruktur. Negara Malaysia memandang zina secara luas, artinya bahwa penafsiran perzinaan mencakup siapapun yang melakukan hubungan seksual baik dalam ikatan perkawinan yang sah maupun diluar perkawinan yang sah. Dalam artian, negara Malaysia secara spesifik telah mengatur setiap subyek yang terlibat dalam prostitusi.

## **5. Bentuk Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi Di Indonesia Dan Malaysia**

### **a. Kondisi Sosial Masyarakat Indonesia dan Malaysia**

Negara Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang secara geografis berdekatan. Indonesia dan Malaysia sering disebut sebagai negara yang serumpun karena persamaan budaya antara kedua negara. Persamaan lainnya dari kedua negara ini terlihat dari struktur sosial yang serupa karena Indonesia dan

---

<sup>41</sup> Vide Pasal 12 Kanun Jenayah Syariah (II) (1993) 2015 Kerajaan Negeri Kelantan

Malaysia merupakan negara yang mayoritas warga negaranya merupakan pemeluk agama islam. Pengaruh kondisi masyarakat yang islami tentunya berpengaruh juga terhadap pola konfigurasi masyarakatnya yang mengedepankan nilai-nilai islami dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tataran kebijakan pemerintah baik di Indonesia dan di Malaysia faktor nilai-nilai islami menjadi faktor yang mempengaruhi, termasuk dalam kebijakan hukum.

Dalam memandang tindak pidana prostitusi kedua negara ini memiliki pandangan yang berbeda. Di Indonesia, prostitusi dipandang sebagai sesuatu yang tidak ilegal. Sebab Indonesia tidak melegalkan adanya prostitusi namun juga tidak melarangnya. Dilihat dari belum terdapatnya peraturan yang menyatakan bahwa prostitusi dilarang, baik dalam KUHP maupun diluar KUHP. Sedangkan di Malaysia, menyatakan secara tegas bahwa prostitusi ilegal. Negara Malaysia memandang prostitusi merupakan perbuatan yang melawan hukum. Hal ini dapat dilihat dari terdapatnya sebuah peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana prostitusi yang terdapat dalam *Syariah Criminal Offences (Federal Territories) Act 1997* dan akan memberikan sanksi terhadap setiap orang yang terlibat dalam prostitusi. Munculnya peraturan tersebut tidak terlepas dari kondisi struktur sosial masyarakat Malaysia yang memandang prostitusi sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai ajaran islam.

Jika ditinjau dari stuktur sosialnya, Indonesia seharusnya dapat membuat peraturan mengenai tindak pidana prostitusi yang lebih mengakomodir nilai-nilai yang hidup di masyarakat khususnya nilai-nilai agama yang merupakan



cerminan dari Pancasila sila ke-1. Karena negara Indonesia masih mengakui adanya hukum islam dalam perumusan hukum positif. Maka diperlukan sebuah peraturan yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat dalam hal memberantas tindak pidana prostitusi. Menempatkan moral berdampingan dengan hukum menurut pandangan penulis memiliki keterkaitan. **Immanuel Kant** pernah menyebutkan antara hukum dan moral memiliki relasi dalam arti moral sebagai bahan muatan hukum dalam tataran *law making proces*.<sup>42</sup>

**b. Prostitusi Sebagian Dari Konsep Perzinaan : Perbandingan antara Indoensia dan Malaysia**

Prostitusi pada dasarnya merupakan perbuatan pembiaran diri untuk berbuat zina. Makna dari perzinaan adalah kecenderungan melakukan hubungan seksual diluar ikatan perkawinan yang sah. Hal tersebut sejalan dengan perbuatan yang dilakukan oleh para subyek prostitusi yang melakukan komersialisasi hubungan seksual antara perempuan yang bertindak sebagai PSK dan laki-laki yang bertindak sebagai pengguna jasa tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Selain itu perzinaan merupakan perbuatan yang mengarah pada penyimpangan terhadap kesusilaan. Mengenai kesusilaan itu sendiri erat kaitannya dengan moralitas masyarakat. Dimensi moral terbagi dalam dua bentuk, *pertama* moral universal yang bisa ditemukan dalam standart moral mazhab hukum alam yang sifatnya berlaku dalam wilayah yang tidak terbatas seperti mencuri merupakan perbuatan yang tercela. *Kedua*, moral relatif yang

---

<sup>42</sup> Ridwan. 2017. *Relasi Hukum dan Moral*. Yogyakarta: Genta Publishing. Hlm 56-57

keberlakuannya tidak mutlak diseluruh tempat seperti sopan santun dan kesusilaan.<sup>43</sup> Moral dibangun dari kesadaran bahwa perbuatan tertentu apabila tetap dilakukan akan menimbulkan kerugian. Selain itu, moralitas dibangun dari ajaran-ajaran agama melalui firman tuhan.

Moral sebagai ukuran menentukan baik dan buruk memiliki dua sumber yaitu moralitas subjektif dan moralitas objektif. Moralitas subjektif berangkat dari perasaan hati nurani menilai baik dan buruk suatu perbuatan. Hati nurani sebagai patokan moralitas teridentifikasi melalui sikap hati nurani terhadap tindakan yang dilakukan. Reaksi hati nurani terhadap perbuatan baik terlihat dari perasaan tentram, sedangkan perbuatan buruk akan menimbulkan kegelisahan.<sup>44</sup> Moralitas objektif bersumber dari ketentuan-ketentuan agama, ideologi dan hukum.<sup>45</sup>

Apabila dikaitkan dengan konteks perzinahan dapat dipastikan menurut moralitas bahwa perzinahan merupakan perbuatan yang buruk dan tercela. Karena adanya perzinahan akan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat sekitar. Kerugian masyarakat sekitar dalam konsepsi delik adat adalah kerugian yang merusak keseimbangan. Rusaknya keseimbangan dikarenakan suatu perbuatan yang dilarang dilakukan karena masyarakat menganggap rusaknya mikro

---

<sup>43</sup> *Ibid*

<sup>44</sup> Salman Luthan, 2012, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 4 VOL. 19. hlm, 510.

<sup>45</sup> *Ibid*

kosmos masyarakat.<sup>46</sup> Rusaknya mikro kosmos akan merusak harmoni masyarakat. Maka adanya prostitusi yang mengarah pada perzinaan dapat merusak struktur sosial di masyarakat.

Di Indonesia berdasarkan pasal 284 KUHP, pengertian zina hanya melarang seseorang melakukan hubungan seksual yang mana salah satu subyeknya harus berada dalam ikatan perkawinan yang sah. Sedangkan jika keduanya subyeknya belum berada dalam ikatan perkawinan yang sah maka hal tersebut tidak tergolong dalam perbuatan zina. Sehingga ketika ada remaja yang melakukan perbuatan zina maka tindakannya tidak dapat dipidana. Dan dalam segi penuntutan, pasal 284 KUHP merupakan delik absolut yang mengharuskan adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan, baik suami maupun istri. Hal ini mencerminkan bahwa pasal 284 KUHP belum mampu mengakomodir pengertian zina yang diinginkan oleh masyarakat.

Di Malaysia memandang perbuatan zina lebih luas. Dilihat dari *Syariah Criminal Offences (Federal Territories) Act 1997* dan Kanun Jenayah Syariah Kerajaan Negeri Kelantan yang melarang setiap orang melakukan hubungan seksual diluar ikatan perkawinan yang sah. Tidak terkecuali hubungan seksual yang hanya berdasarkan komersialisasi yaitu prostitusi. Dalam pasal 23 ayat (1) dan (2) *Syariah Criminal Offences (Federal Territories) Act 1997* serta pasal 12 Kanun Jenayah Syariah Kerajaan Negeri Kelantan menunjukkan bahwa adanya

---

<sup>46</sup> Imam Sudiyat, 2012. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Cet. Ke 7. Yogyakarta, Liberty. Hlm 177

larangan terhadap setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan hubungan seksual diluar ikatan perkawinan yang sah. Jadi negara Malaysia sudah mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam hal perzinaan.

Selanjutnya mengenai *ius constitutum* tindak pidana prostitusi antara Indonesia dan Malaysia akan penulis paparkan dalam bentuk tabel dibawah ini :



**Tabel 5. Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi Antara Indonesia Dan Malaysia**

No.	Elemen	Indonesia	Malaysia
1.	Sifat peraturan	Bersifat secara Nasional	1. Wilayah Kuala Lumpur dan Labuan. 2. Wilayah teritorial Negeri Kelantan
2.	Penjatuhan Sanksi Pidana	Terhadap setiap orang	Terhadap pemeluk agama islam
3.	Sifat dan Bentuk Sanksi	Alternatif & Kumulatif. Bentuk pidana penjara, denda dan kurungan	Sifatnya sama. Bentuk pidana penjara, denda dan cambuk
4.	Pelaku	1. Orang yang mengadakan tempat pelacuran 2. Mucikari 3. Setiap orang yang mentransmisikan konten yang bermuatan kesusilaan melalui media elektronik.	1. PSK 2. Mucikari 3. Pengguna Jasa
5.	Bahasa Hukum	Dinyatakan secara tersirat	Dinyatakan secara tersurat
6.	Kekuatan Berlaku	Darurat	Mutlak
7.	Kekurangan	Pengaturan tindak pidana prostitusi masih lemah	Pemberlakuan peraturan yang hanya diberlakukan terhadap warga negara yang beragama islam
8.	Kelebihan	Memiliki aturan mengenai motif sebelum terjadinya tindak pidana prostitusi	Memiliki peraturan tentang tindak pidana prostitusi

Sumber Data : diolah dari analisa perbandingan *Ius Constitutum* tindak pidana prostitusi di Indonesia dan Malaysia

Berdasarkan tabel diatas, terdapat kekurangan dan kelebihan pada pengaturan tindak pidana prostitusi di masing-masing negara. Di Indonesia kekurangan hanya terletak pada belum dilakukannya pemidanaan terhadap PSK dan pengguna jasa. Hal ini dapat dilihat dari penjatuhan sanksi yang hanya diberikan kepada setiap orang yang bertindak sebagai mucikari dan pemilik tempat pelacuran. Namun kelebihan negara Indonesia telah memiliki sebuah payung hukum untuk mencegah motif di balik adanya tindak pidana prostitusi misal pada UU ITE yang mencegah terjadinya transaksi prostitusi online.

Sedangkan di negara Malaysia yang mengatur tindak pidana prostitusi lebih kompleks hanya saja pemberlakuan peraturan tersebut hanya di wilayah teritorial yaitu Kuala Lumpur dan Labuan saja. Sedangkan Kerajaan Negeri Kelantan masih belum memiliki aturan khusus mengenai tindak pidana prostitusi. Dan subyek dari peraturan tersebut hanya diberlakukan terhadap warga negara yang memeluk agama islam. Sedangkan prostitusi itu sendiri bisa hadir dimanapun bahkan sampai ke setiap pelosok negeri. Adanya praktik prostitusi itu sendiri berasal dari berbagai macam komponen masyarakat yang tidak hanya masyarakat yang beragama islam.

Terdapatnya kekurangan dalam pengaturan tindak pidana prostitusi pada masing-masing negara maka diperlukan sebuah pembaharuan hukum untuk memberantas tindak pidana prostitusi. Di Indonesia pembaharuan hukum yang dapat dilakukan adalah dengan memasukkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat guna mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang sesuai dengan

pancasila. Sedangkan di Malaysia pembaharuan hukumnya meliputi wilayah pemberlakuan hukumnya agar diatur secara nasional. Dan juga yang menjadi subyek dalam pengaturan tindak pidana prostitusi dirubah menjadi terhadap setiap warga negara agar tercipta ketertiban di setiap komponen struktur sosial masyarakat.

## **B. Ketentuan Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia**

### **1. Ketentuan Tindak Pidana Prostitusi Dalam KUHP**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang saat ini berlaku merupakan hasil dari peninggalan kolonial Belanda. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia yang pernah dijajah oleh belanda selama kurun waktu yang cukup lama. Hegemoni kekuasaan hukum barat terhadap hukum asli Indonesia yang dibawa belanda ke Hindia belanda telah menyebabkan sistem hukum kita terkooptasi kedalam sistem hukum barat dan menganggap hukum asli bangsa nusantara pada waktu itu tidak relevan dan kemudian ditinggalkan.

Kooptasi hukum barat oleh sistem hukum Indonesia terus berlanjut hingga bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan Belanda. Setelah Indonesia merdeka pilihan akan sistem hukum yang dianut Indonesia masih mengedepankan ciri hukum barat yang kental akan nilai-nilai liberalism. Hal ini disebabkan karena Indonesia masih belum memiliki sistem hukum berdasarkan pada nilai-nilai hukum asli pribumi. Akan tetapi Indonesia memiliki upaya untuk melakukan sebuah pembaharuan hukum berdasarkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat

hususnya dalam bidang hukum pidana. Karena hukum pidana yang diwariskan oleh kolonial belanda dirasa masih mengedepankan paham individualisme dan liberalisme. Hal ini sangat bertentangan dengan stuktur sosial masyarakat Indonesia yang tergolong komunal dan mengedepankan harmonisasi pada setiap manusia. Sehingga diperlukan adanya pembaharuan hukum pidana agar tercipta penegkan hukum yang adil.

Pancasila yang menjadi *grounnorm* dan spirit masyarakat Indonesia dalam menjalankan setiap aktifitas sosial dapat dijadikan sebagai landasan dalam melakukan pembaharuan hukum pidana di Indonesia saat ini. Sebagai ideologi bangsa Indonesia pancasila merupakan cerminan dari moralitas dan nilai-nilai kebaikan yang otoritif. Nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila yang hakikatnya adalah sumber dari segala sumber hukum dapat digunakan dalam menemukan dan menggali hukum.

Tindak pidana prostitusi yang termasuk delik kesusilaan dalam KUHP. Delik kesusilaan yang berlaku saat ini masih belum mencerminkan moralitas masyarakat Indonesia. Didasarkan masih belum adanya pembaharuan hukum dalam hukum pidana di Indonesia saat ini. Moralitas yang terdapat dalam delik kesusilaan masih mengandung nilai-nilai liberalisme masyarakat barat. Apalagi dalam konteks tindak pidana prostitusi yang cenderung menunjukkan adanya perilaku seks bebas yang didasarkan pada budaya barat yang sangat liberal. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan aspek kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai yang lebih mengedepankan



moralitas yang tercermin dalam Pancasila. Seperti Pancasila sila ke-1 yang mengandung makna setiap perilaku masyarakat harus mencerminkan ketentuan-ketentuan Tuhan yang terpancar dari setiap ajaran agama. Pada sila ke-2 yang mengandung makna setiap warga negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia agar menjadi manusia yang beradab. Adanya tindak pidana prostitusi dipastikan sebagai kejahatan yang bertentangan dengan Pancasila sebab akan membuat manusia menjadi amoral dan manusia menjauhi ajaran-ajaran Tuhan.

Pengaturan tindak pidana prostitusi dalam KUHP masih belum kompleks. Dalam KUHP hanya melakukan pemidanaan terhadap beberapa pihak saja yaitu orang yang memiliki tempat pelacuran dan mucikari. Sedangkan subyek yang terlibat dalam prostitusi yaitu PSK dan pengguna jasa tidak dapat dipidana. Meskipun prostitusi tersebut mengarah pada perbuatan zina, para subyek prostitusi tidak dapat dijerat menggunakan pasal 284 KUHP. Karena pasal tersebut merupakan delik absolut yang mengharuskan adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan jika ingin dilakukan penuntutan. Hal ini menunjukkan bahwa belum terciptanya kepastian hukum yang adil dalam menangani tindak pidana prostitusi. Dan juga aturan yang mengatur tindak pidana prostitusi belum memasukan nilai-nilai yang hidup di masyarakat berdasarkan Pancasila.

## **2. Ketentuan Tindak Pidana Prostitusi Diluar KUHP**

Terdapat beberapa aturan yang mengatur mengenai tindak pidana prostitusi selain KUHP seperti dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kedua aturan ini bukan dimaksudkan mengatur secara spesifik mengenai tindak pidana prostitusi. Hanya saja beberapa pasal yang terdapat dalam kedua aturan tersebut berisi tentang unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana prostitusi.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang notabene merupakan sebuah aturan yang dibuat untuk menanggulangi tindak pidana yang dilakukan menggunakan teknologi internet. Tidak terkecuali mengenai tindak prostitusi yang juga marak dilakukan melalui internet misalnya dalam prostitusi online yang melakukan transaksi jual beli jasa prostitusi melalui internet. Pasal 27 ayat (1) UU ITE melarang setiap orang yang melakukan tindakan mentransmisikan konten yang bermuatan kesusilaan yang menggunakan teknologi elektronik, sehingga pasal ini tepat jika digunakan dalam memberantas transaksi prostitusi online.<sup>47</sup> Namun Pasal 27 ayat (1) UU ITE ini hanya melarang motif sebelum terjadinya prostitusi yakni ketika salah satu pihak yang tengah mentransmisikan konten yang bermuatan kesusilaan kepada pihak yang hendak menyewa jasa prostitusi maka orang

---

<sup>47</sup> Vide Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

tersebut dapat dipidana. Sedangkan terhadap hubungan seksual yang dilakukan tidak dapat dijerat menggunakan UU ITE.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang notabenenya merupakan aturan yang dibuat untuk memberantas perdagangan manusia. Tindak pidana prostitusi dapat dimaknai sebagai tindakan memperdagangkan manusia melalui eksploitasi seksual. Dalam pasal 2 ayat (1) UU TPPO ini melarang setiap tindakan yang merujuk pada adanya eksploitasi manusia, tidak terkecuali eksploitasi seksual.<sup>48</sup> Dalam UU TPPO unsur perdagangan orangnya terdapat dalam peran mucikari terhadap PSK. Namun perlu diperhatikan bahwa orang yang menjadi PSK cenderung dikategorikan sebagai korban dari perdagangan manusia. Hal ini didasarkan pada adanya kondisi keterpaksaan yang dilakukan oleh pekerja seks komersial. Sedangkan pada tindak pidana prostitusi PSK yang merupakan subyek prostitusi melakukan tindakannya tanpa adanya unsur keterpaksaan dan murni dilakukan hanya untuk mendapatkan imbalan atas hubungan seksual yang dilakukan. Jika pasal ini diterapkan dalam tindak pidana prostitusi maka akan terjadi ambiguitas antara PSK sebagai korban dan PSK sebagai pelaku. Jadi UU TPPO kurang tepat rasanya jika digunakan untuk memberantas prostitusi.

Jadi adanya kedua Undang-undang diatas belum mampu menjawab permasalahan mengenai tindak pidana prostitusi yang ada di Indonesia. Kedua

---

<sup>48</sup> Vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-undang itu masih belum relevan jika dikategorikan sebagai kriminalisasi tindak pidana prostitusi. Karena undang-undang itu hanya memberikan aturan yang tidak menyeluruh. Maka dari itu, pembaharuan hukum pidana harus memberikan ruang terhadap peristiwa atau tindak pidana prostitusi ini. Maka perlu kiranya Negara Indonesia merealisasikan *iusconstituendum* masyarakat Indonesia terhadap kriminalisasi tindak pidana prostitusi, supaya negara ini tetap menjaga marwah dan nilai-nilai ketimuran yang sangat menjunjung tinggi moralitas.

### **3. Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi dalam RUU KUHP**

Semangat Indonesia dalam melakukan pembaharuan hukum pidana telah berlangsung sejak tahun 1960-an. Para pakar hukum pidana di Indonesia telah memikirkan pembaharuan hukum pidana yang bersifat menyeluruh (komprehensif) yang meliputi hukum pidana formil, hukum pidana materiil, dan hukum pelaksanaan pidana. Namun upaya tersebut sampai saat ini masih belum terealisasi dan masih belum ada pembaharuan hukum pidana di Indonesia saat ini. Indonesia selama ini hanya melakukan pembuatan undang-undang baru untuk menutupi kekosongan hukum yang mengarah pada tindak pidana yang belum diatur oleh KUHP.

Perumusan RUU KUHP yang telah disusun dalam beberapa tahun terakhir nampaknya belum mengkategorikan prostitusi sebagai tindak pidana terhadap kesusilaan. Dalam perumusan tersebut hanya menjabarkan peluasan makna dari perbuatan zina dan pencabulan yang dirumuskan dalam pasal 417-429 RUU

KUHP. Konsep perzinaan dalam RUU KUHP mengalami perluasan makna dimana berdasarkan Pasal 417 RUU KUHP telah mengatur setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan hubungan seksual diluar ikatan perkawinan yang sah akan dipidana.<sup>49</sup> Dengan adanya perluasan makna dalam perbuatan zina maka akan mengurangi adanya kenakalan remaja yang melakukan hubungan seksual tanpa ikatan perkawinan. Namun pasal ini masih berkategori sebagai delik aduan yang mengharuskan adanya pengaduan jika ingin melakukan penuntutan.

Dalam hal pemidanaan terhadap para pelaku tindak pidana prostitusi, RUU KUHP masih saja hanya dilakukan terhadap mucikari yang dianggap sebagai orang yang membantu mempermudah dilakukannya perbuatan cabul. Sedangkan subyek prostitusinya yaitu PSK dan pengguna jasa masih lolos dari jeratan pidana. Sehingga diperlukan kajian lebih lanjut untuk meninjau sejauh mana tindak pidana prostitusi dapat dirumuskan dalam RUU KUHP.

Pemidanaan terhadap pekerja seks komersial bertujuan agar mencegah dan melarang setiap orang yang menjual dirinya untuk tujuan eksploitasi organ seksual demi mendapatkan imbalan dari perbuatan yang telah dilakukan. Sedangkan pemidanaan terhadap setiap pengguna jasa prostitusi bertujuan agar setiap orang dapat mengendalikan naluri seksnya dan melarang setiap orang untuk tidak melakukan penyaluran seks yang dilakukan secara komersil. Tujuan lainnya adalah adanya suatu bentuk pemenuhan nilai kemanusiaan yang adil dan

---

<sup>49</sup> Vide Pasal 417 Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana

beradab yang menyatakan bahwa manusia bukanlah obyek yang dapat diperjualbelikan.

Dalam rumusan RUU KUHP seharusnya dilakukan penambahan rumusan norma kriminalisasi terhadap tindak pidana prostitusi khususnya yang melarang setiap orang yang menjadi PSK dan pengguna jasa agar tercipta ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Dalam membuat rumusan norma tersebut harus memenuhi syarat teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, baik dalam sistematika, pilahan kata serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti. Agar tidak terjadi berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Sehingga disini penulis menawarkan penambahan rumusan norma kriminalisasi terhadap PSK dan pengguna jasa dalam RUU KUHP:

Pekerja Seks Komerisal

Pasal .....

- 1) Setiap orang atas persetujuannya melakukan hubungan seksual diluar ikatan pernikahan yang sah untuk memperoleh atau menerima keuntungan atau imbalan atas perbuatannya diancam pidana penjara selama ..... dan denda sebesar .....
- 2) Setiap wanita yang berkeliaran di tempat umum dengan maksud menawarkan diri, mengajak orang lain tujuan melacurkan diri diancam pidana penjara selama ..... dan denda sebesar .....

Pengguna Jasa

Pasal .....

- 1) Barang siapa yang memberikan imbalan kepada orang lain dengan tujuan untuk melakukan hubungan seksual akan dipidana penjara selama ..... dan denda sebesar .....

Pemidanaan terhadap PSK dan pengguna jasa bukan hanya pembenaran dari pidana yakni pembalasan terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan yang merugikan dan melanggar norma, akan tetapi harus memperhatikan substansi dari apa yang ingin dicapai dengan adanya pemidaan tersebut. Pemidanaan terhadap PSK dan pengguna jasa harus memberikan manfaat tata tertib terhadap masyarakat. Dengan adanya pidana ini akan memunculkan rasa takut terhadap setiap orang yang akan melakukan kegiatan prostitusi. Pidana diberikan bukan karena orang telah melakukan kejahatan, namun lebih kepada pencegahan terhadap orang yang akan melakukan kejahatan. Dengan adanya pemidaan terhadap PSK dan pengguna jasa akan menimbulkan sikap kepuasan moral dan batin bahwa prostitusi yang merupakan hubungan seksual yang dilakukan secara komersil merupakan suata perbuatan melawan hukum dan melanggar norma maupun aturan tertulis dan bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat, sehingga jika tetap dilakukan maka akan ada pidana yang akan diterima.

Dengan demikian adanya pemidaan terhadap setiap orang yang terlibat dalam tindak pidana prostitusi, baik mucikari, PSK maupun pengguna jasa akan menciptakan sebuah ketertiban di dalam masysarakat. Sehingga setiap orang tidak bisa leluasa lagi dalam melakukan praktik prostitusi. Dan juga setiap orang tidak dapat melakukan hubungan seks secara komersial yang mencerminkan penjatuhan harkat dan martabat manusia. Hal tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang menyatakan bahwa cita-cita hukum

kemanusiaan yang adil dan beradab dapat diwujudkan dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan memberikan penghargaan dan perlakuan yang sama terhadap setiap warga.

